



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1936/MENKES/SK/IX/2011

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KEENAM
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Keenam Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/Menkes/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

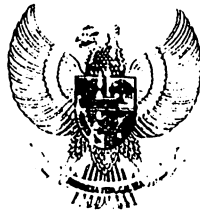
- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor 4539/H3.1.1/PPd/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Permohonan Surat Keputusan;
 2. Surat Ketua Pusat Data Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Nomor 4370/DN/P3S/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Penerimaan PPDS-BK Tahap III, IV dan V Fakultas Kedokteran Sumatera Utara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 112/H16.2/PPDS/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Penerimaan Peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode Januari 2011;
4. Surat Ketua Tim Koordinasi Peiaksana Program Pendidikan Dokter Spesialis I (TKP-PPDS I) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor 670/PPDS-I/FK-UNUD/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Laporan Hasil Seleksi Pesera PPDS-BK Periode Januari 2011;
5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 6491/H27.1.17/DT/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Penerimaan Mahasiswa PPDS-BK Depkes;
6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 1057/H10.7/AK/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi PPDS-BK I;
7. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Nomor 5779/KG/SP/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Hasil Tes Tubel Kemkes SDM Kes PPDGIS UGM;
8. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 3929/H7.3.4/D/PP/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Penerimaan PPDS-BK Kemenkes;
9. Surat Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 184/H9.1.4/PPDS/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Daftar Nama Calon PPDS-BK yang Masuk Bulan Januari 2011;
10. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Nomor 5886/H6.7/FK/PP/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Penetapan Peserta PPDS I Periode Maret 2011 Fakultas Kedokteran Padjajaran;
11. Surat Ketua Pusat Data Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Nomor 3943/DN/P3S/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Penerimaan PPDS-BK Tahap V di FK UI;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

12. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Fatulangi Nomor 225/H12.1/PP/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal Usulan Terbaru Peserta PFDS-BK yang Lulus Seleksi Periode April dan Oktober 2010;
13. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 0832/H4.8/PP.17/2011 tanggal 8 Februari 2011 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPDS Bantuan Beasiswa Kompetensi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KEENAM TAHUN 2011.
- KESATU : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Januari 2011.
- KETIGA : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
- KEEMPAT : Peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dimaksud pada Diktum Kedua wajib melaksanakan Penugasan Khusus Pelayanan Medik Spesialistik di daerah selama 6 (enam) bulan pada masa pendidikan dan melaksanakan pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2011

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
7. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
11. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
13. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
14. Ketua Pokja Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
15. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan;
16. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
19. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
20. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
21. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
22. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
23. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
24. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia;
25. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia;
26. Bendahara Pengeluaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan;
27. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ANGKATAN KEENAM TAHUN 2011
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SERELAS MARET

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENCIPTAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I LULUS SFLEKSI AKADEMIK												
1	dr. Heri Dumas	Gurung Kidul, 15-07-1980	198007152009031008	PNSD	Kab. Kuala Kurun	RSUD Kuala Kurun	RSUD Kuala Kurun	Kalimantan Tengah	Anestesiologi	Januari 2011	I	RSUD Kuala Kurun
2	dr. Chris Andra	Sentani Jayapura, 18-04-1979	26.1.06-0635	PTT	Pusat	PKM Sentani Kab. Jayapura	Dinkes Kab. Jayapura	Papua	Ilmu Bedah	Januari 2011	I	RSUD di Kab. Jayapura
3	dr. Veirene Tampubolon	Lhokseumawe, 02-10-1978	197810032006041611	PNSD	Kab. Toba Samosir	RSUD Forsea, Kab. Tobasa	Peridu Kab. Toba Samosir	Sumatera Utara	Ilmu Bedah	Januari 2011	I	RSUD Forsea, Kab. Tobasa
4	dr. Dwi Sariningsin	Klaten, 04-08-1978	197808042008012018	PNSD	Kab. Wonogiri	RSUD dr. Soediran Mangun Sumerso, Wonogiri	Dinkes Kab. Wonogiri	Jawa Tengah	Ilmu Kesehatan Anak	Januari 2011	I	RSUD Wonogiri
5	dr. Nailil Muna	Surakarta, 06-03-1979	197903062007012010	PNSD	Kab. Banjar	Dinkes Banjar	Pemkab Banjar	Kalimantan Selatan	Ilmu Kesehatan Anak	Januari 2011	I	Kab. Banjar
6	dr. Firdaus Yamani	Anjir Pasar, 04-02-1983	198302042010011006	PNSD	Prov. Kalimantan Selatan	RSJD Sambang Lihum	RSJD Sambang Lihum	Kalimantan Selatan	Ilmu Kesehatan Jiwa	Januari 2011	I	RSJD Sambang Lihum
7	dr. Indah Prianti	Jakarta, 10-12-1974	04.1.0036178	Pasca PTT	Fusi	RSU Permata Madina, Panyambungan	Dinkes Kab. Mandailing Nata	Sumatera Utara	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2011	I	RSU Permata Madina, Panyambungan
8	dr. Nur Ekusari	Peranbaru, 22-03-1981	198103222009042001	PNSD	Kab. Merangin	Dinkes (PKM Pasar Masurai)	Dinkes Kab. Merangin	Jambi	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2011	I	RSUD di Kab. Merangin
9	dr. Indrajati Dwi Mulyawan	Denpasar, 12-10-1981	198110122009021003	PNSD	Kab. Cirebon	RSUD Gunung Jati Cirebon	RSUD Gunung Jati Cirebon	Jawa Barat	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2011	I	RSUD Gunung Jati Cirebon
10	dr. Wahyu Mustadi	Cirebon, 10-06-1976	197606102009031005	PNSD	Kab. Banyumas	PKM Pekuncen, Dinkes Kab. Banyumas	Dinkes Kab. Banyumas	Jawa Tengah	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2011	I	RSUD di Kab. Banyumas
11	dr. Khilyatul Baroroh	Pekalongan, 23-04-1979	197904232005012016	PNSD	Kota Pekalongan	Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Jawa Tengah	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2011	I	RSUD di Kota Pekalongan
12	dr. Fadlia Yulistiana	Madiun, 07-05-1981	198107062005022005	PNSD	Kab. Madiun	PKM Cagangan Kab Madiun	Pemkab Madiun	Jawa Timur	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2011	I	RSUD di Kab. Madiun
13	dr. Jeannette Siagian	Jakarta, 08-10-1975	19751008200712005	PNSD	Provinsi Kalimantan Tengah	RSU dr. Donis Silvanus	RSU dr. Donis Silvanus	Kalimantan Tengah	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2011	I	RSU dr. Donis Silvanus
14	dr. Lusiana								Ilmu Penyakit Paru	Januari 2011	I	
15	dr. Ury Herdiantari Suinta	29 April 1977	198309132009032004	CPNSD	Kota Pangkal Pinang	Beskestes	Pemkot Pangkal Pinang	Bangka Belitung	Obstetri & Ginekologi	Januari 2011	I	RSUD di Kota Pangkal Pinang
16	dr. Sandy Irwanto	S.abaya 25-07-1981	198107232009031002	CPNSD	Kab. Barito Utara	RSUD Muara Teweh	Kab. Barito Utara	Kalimantan Tengah	Obstetri & Ginekologi	Januari 2011	I	RSUD Muara Teweh
17	dr. Hamadi	Sukoharjo 14-04-1974	197404142007011018	PNSD	Kab. Wonogiri	RSUD Wonogiri	RSUD Wonogiri	Jawa Tengah	Patologi Klinik	Januari 2011	I	RSUD Wonogiri
18	dr. Rina M.	Jakarta, 19-04-1976	197604192003122006	PNSD	Kab. Indragiri Hulu	Dinkes Kab. Indragiri Hulu	Pemkab Indragiri Hulu	Riau	Patologi Klinik	Januari 2011	I	RSUD di Kab. Indragiri Hulu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ANGKATAN KEENAM TAHUN 2011
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	TENEMPATAN KEMBALI	KCT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II RESIDEN:												
19	dr. Puwaningsih	Klaten, 26-05-1980	198005262008122002	PNSD	Kota Magelang	RSJ Prof. dr. Soeroyo Mgl	RSJ Prof. dr. Soeroyo Mgl.	Jawa Tengah	Ilmu Kesehatan Jiwa	Januari 2011	I	RSJ Prof. dr. Soeroyo Mgl.
20	dr. Yugo Irianto	Manokwari, 16-02-1973	393273	PNS	TNI AD	KESDAM III/SLW	KEMHAN	Kementerian Pertahanan	Anestesiologi	Juli 2010	II	KESDAM III/SLW
21	dr. Muklis	Bireuen, 15-10-1969	196910152002121004	PNSD	Kab. Aceh Utara	PKM Sawang	Dinkes Kab. Aceh Utara	Aceh	Ilmu Penyakit Dalam	Juli 2010	II	RSU Cut Meutia A. Utara
22	dr. Yunita Puspitasari	Magelang, 04-03-1970	197006042002122003	PNSD	Kab. Karawang	Dinkes Kab. Karawang	Dinkes Kab. Karawang	Jawa Barat	Ilmu Penyakit Paru	Juli 2009	IV	RSUD di Kab. Karawang
23	dr. Tri Supriyanto	Ngawi, 10-07-1975	530380	PNS	TNI AU	LANUD ISWAHYUDI	KEMHAN	Kementerian Pertahanan	Ilmu Penyakit Dalam	Juli 2010	II	LANUD ISWAHYUDI
24	dr. Gresilia Hilbarida Mendrofa	Malang, 07-02-1975	107502072007012007	PNSD	Kab. Kediri	RSUD Pare	Pemda Kab. Kediri	Jawa Timur	Obstetri & Ginekologi	Januari 2010	III	RSUD Pare Kediri
25	dr. Abraham Anjy G.	Jakarta, 13-08-1975	11030002020875	PNS	TNI AD	KESKOSTRAD	KEMHAN	Kementerian Pertahanan	Obstetri & Ginekologi	Agustus 2010	II	KESKOSTRAD
26	dr. Gunawan	Jakarta, 19-01-1975	11040006370175	PNS	TNI AD	KESDAM III/SLW	KEMHAN	Kementerian Pertahanan	Obstetri & Ginekologi	Agustus 2010	II	KESDAM III/SLW
27	dr. Musayadah	Surabaya, 07-03-1969	196903072003122002	PNSD	Kab. Sumbawa	RSUD Sumbawa	Pemda Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Patologi Klinik	Januari 2010	III	RSUD Sumbawa
28	dr. Siamsasi Roharni	Bumiayu, 08-11-1970	197011082001122004	PNSD	Kab. Magelang	Dinkes Kab. Magelang	Pemda Kab. Magelang	Jawa Tengah	THT - KL	Januari 2011	I	RSUD di Kab. Magelang